RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029

KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029"** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di Kecamatan Prembun. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Kecamatan Prembun bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang perencanaan pembangunan Kecamatan Prembun yang lebih baik di Kabupaten Kebumen. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Prembun, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT PREMBUN

MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198206232000121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **9**
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 13
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 38
2.1.5. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 39
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 42
2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah 42
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah 51
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **54**
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah 54
3.2. Strategi Perangkat Daerah 56
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 56
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **58**
4.1. Uraian Program dan Kegiatan 58
4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 69
4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 76
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 80
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 81
BAB V. PENUTUP **82**
LAMPIRAN **84**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Prembun Tahun 2024 10
Tabel 2.2 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Prembun 11
Tabel 2.3 DTSEN Kecamatan Prembun Tahun 2025 12
Tabel 2.4 IDM Kecamatan Prembun Tahun 2024 12
Tabel 2.5 Kondisi Pegawai Kecamatan Prembun 23
Tabel 2.6 Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Jenis Kelamin 23
Tabel 2.7 Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Eselon Jabatan 24
Tabel 2.8 Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Tingkat Pendidikan 25
Tabel 2.9 Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Golongan 26
Tabel 2.10 Aset Tanah Kecamatan Prembun 28
Tabel 2.11 Gedung dan Bangunan Kecamatan Prembun 28
Tabel 2.12 Sarana dan Prasarana Kecamatan Prembun 29
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 35
Tabel 2.14 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun Tahun 2020-2025 36
Tabel 2.15 Anggaran dan Realiasasi Program dan Kecamatan Prembun Tahun 2020-2025 40
Tabel 2.16 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Prembun 43
Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 53
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 55
Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD 56
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 57
Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Prembun 59
Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah 61
Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 62
Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .. 69
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 76
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 80
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Prembun 9
Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Prembun .. 10
Gambar 2.3 Bagan Organisasi Kecamatan Prembun 22
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan

Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Prembun dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Prembun untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

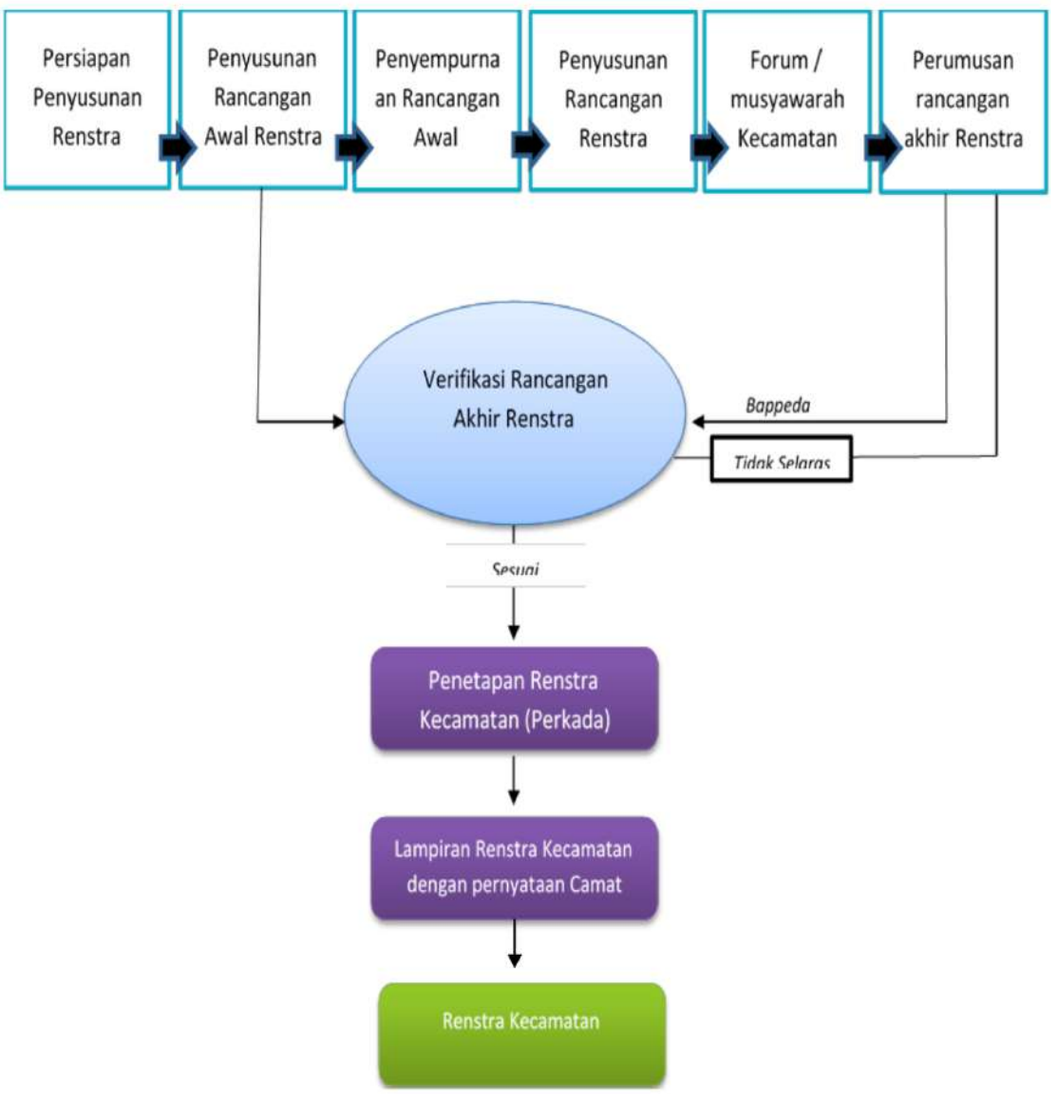
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;

3. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Prembun

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Prembun tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Prembun menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Recanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan

25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Perencanaan Pembangunan Kecamatan Prembun dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Prembun adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penganggaran APBD; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Prembun

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, sumber daya, kinerja

pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Prembun.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Prembun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian program, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, serta target kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

BAB V Penutup

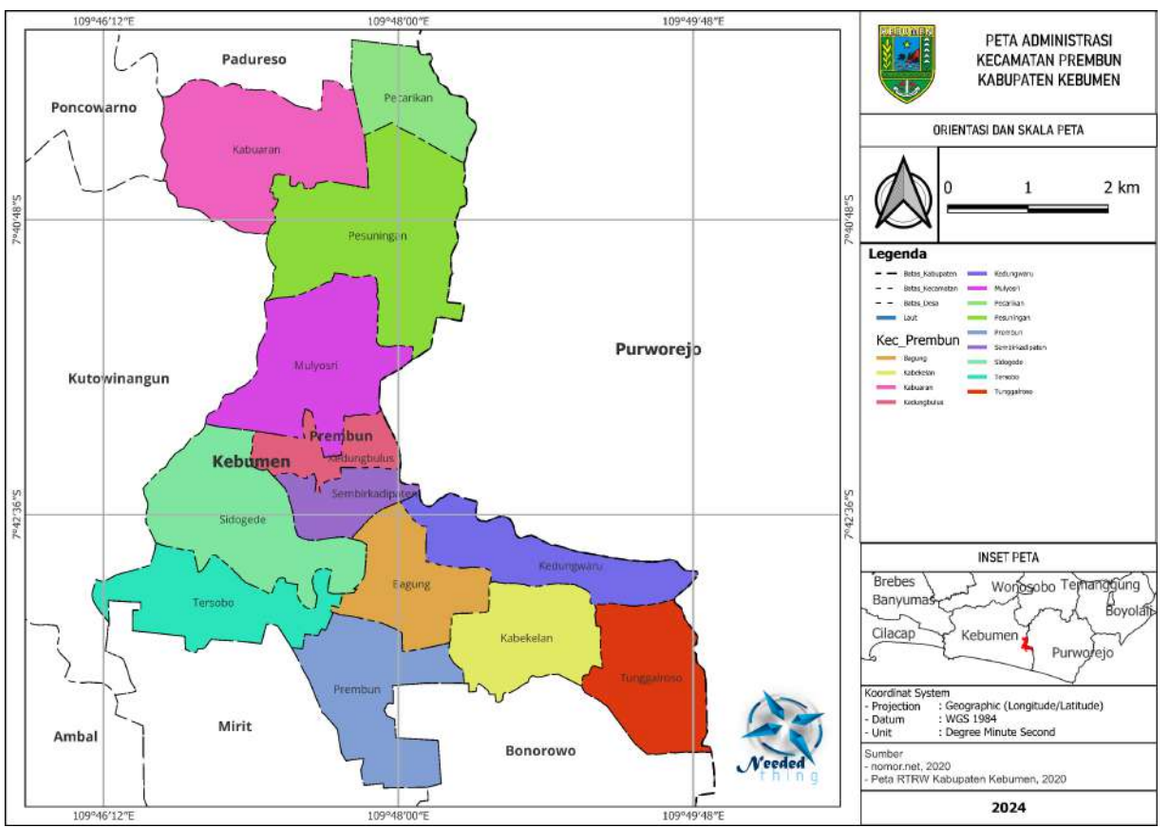
Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PREMBUN

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

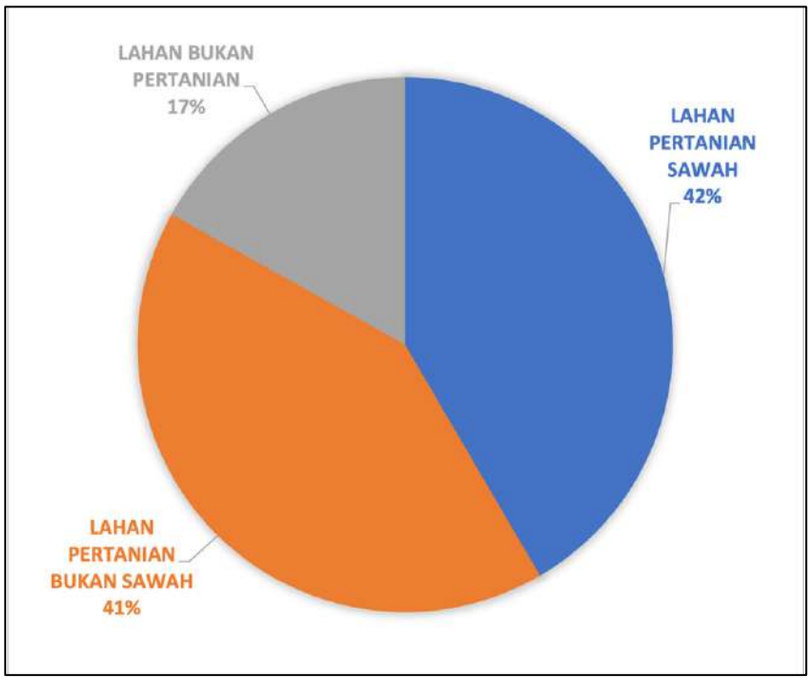
Kecamatan Prembun merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak antar 7,63° – 7,68° Lintang Selatan dan 109,66° - 109,77° Bujur Timur. Terletak pada ketinggian antara 10 meter sampai dengan 32 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Seluruh desa di kecamatan Prembun termasuk dataran. Secara keseluruhan, luas wilayah Kecamatan Prembun adalah 2.396 Ha. Desa Kabuaran merupakan desa terluas di Kecamatan Prembun, dengan luas sebesar 318 Ha atau 13,27 persen dari total luas wilayah Kecamatan Prembun. Adapun desa terkecil adalah Desa Kedungwaru, dengan luas sebesar 103 Ha atau 4,3 persen dari luas wilayah Kecamatan Prembun. Adapun batas wilayah Kecamatan Prembun adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padureso
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonorowo



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Prembun
(Sumber: www.neededthing.blogspot.com)

Berdasarkan jenis lahan, 42 persen lahan di Kecamatan Prembun adalah lahan pertanian sawah, baik sawah irigasi ataupun non irigasi. Selain itu ada juga lahan pertanian bukan sawah sebesar 41 persen, jenis lahan ini diantaranya terdiri dari tegalan/kebun, tambak/kolam, dan hutan. Sedangkan 17 persen sisanya digunakan sebagai lahan bukan pertanian.



Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Prembun
(Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka 2025)

Sementara itu secara geografis, Kecamatan Prembun relatif jauh dari Ibukota Kabupaten Kebumen. Desa Pecarikan merupakan wilayah dengan jarak ke Kantor Kabupaten Kebumen terjauh yaitu 26 Km, sedangkan wilayah terdekat adalah Desa Tersobo dengan jarak ke Kantor Kabupaten adalah 17 Km. Selain itu Desa Pecarikan juga menjadi desa dengan jarak ke Kantor Kecamatan Prembun terjauh, yakni 9 Km.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Prembun Tahun 2024

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tersobo	1.467	1.477	2.944
2.	Prembun	2.008	2.010	4.018
3.	Kabekelan	1.134	1.173	2.307
4.	Tunggalroso	1.309	1.288	2.597
5.	Kedungwaru	683	663	1.346
6.	Bagung	1.102	1.143	2.245
7.	Sidogede	2.028	1.864	3.892
8.	Sembirkadipaten	756	778	1.534

9.	Kedungbulus	588	603	1.191
10.	Mulyosri	1.020	980	2.000
11.	Pesuningan	1.140	1.150	2.290
12.	Pecarikan	548	534	1.082
13.	Kabuaran	1.515	1.466	2.981
Total		**15.298**	**15.129**	**30.427**

(Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka 2025)

Berdasarkan tabel 2.1. Kecamatan Prembun memiliki penduduk sebanyak 30.427 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 15.298 (50,28 %) dan perempuan sebanyak 15.129 (49,72 %), kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.2
Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Prembun

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	18	26	458
2	SD/Sederajat	24	179	2.663
3	SMP/Sederajat	4	183	2.606
4	SMA/Sederajat	4	125	2.011

(Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka 2025)

Secara keseluruhan, jumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Prembun tercatat sebanyak 50 sekolah dengan total 7.738 siswa. Komposisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kecamatan Prembun telah merata dan lengkap dari berbagai jenjang. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Prembun terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit, 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) Puskesmas Pembantu, 2 (dua) Apotik, dan 77 (tujuh puluh tujuh) Posyandu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Prembun terdapat pasar modern (minimarket/swalayan/supermarket) sebanyak 8 (delapan) buah, Pasar desa sebanyak 7 (tujuh) buah.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Prembun masih relatif tinggi, dari 10.267 KK yang masih masuk di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yaitu 4.849 KK.

Tabel 2.3
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kecamatan Prembun Per-Oktober 2025

NO	DESA	DESIL 1 (Miskin Ekstrem)	DESIL 2 (Miskin)	DESIl 3 (Hampir Miskin)	DESIL 4 (Rentan Miskin)	DESIL 5 (Menengah)	DESIL 6-9 (Menengah Atas-Kaya)	GRAND TOTAL
1	Tersobo	102	100	83	84	92	491	952
2	Prembun	165	150	110	106	113	765	1409
3	Kabekelan	90	70	49	54	66	489	818
4	Tunggalroso	184	123	89	66	55	352	869
5	Kedungwaru	62	64	44	34	37	199	440
6	Bagung	112	112	68	66	71	366	795
7	Sidogede	310	195	126	91	67	404	1193
8	Sembirkadipaten	112	86	69	54	37	175	533
9	Kedungbulus	67	47	47	40	47	147	395
10	Mulyosri	121	91	69	62	48	281	672
11	Pesuningan	95	85	75	55	78	414	802
12	Pecarikan	71	51	34	22	36	142	356
13	Kabuaran	192	175	113	107	66	382	1035
JUMLAH		**1683**	**1349**	**976**	**841**	**813**	**4607**	**10269**
KATEGORI DTSEN (Jumlah Desil 1 - Desil 4)					**4849**			

(Sumber: Pendamping PKH dan Kasi Pelum Kesos Kec Prembun 2025)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kepala keluarga di Kecamatan Prembun tahun 2025 tercatat 10.269 KK. Dari total tersebut, masih terdapat 4.849 KK (sekitar 47 %) yang masuk kategori miskin (Desil 1–4), menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi. Sementara itu, 4.607 KK (44 %) berada pada kelompok menengah atas hingga kaya (Desil 6–10), dan sisanya menempati kategori menengah. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan kesejahteraan masih cukup nyata, dengan proporsi keluarga miskin hampir sebanding dengan yang lebih Sejahtera

Tabel 2.4
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Prembun Tahun 2024

No.	Desa	Status Desa						
		Nilai				Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM			
1.	Tersobo	0,8400	0,9000	0,6667	0,8022		V	
2.	Prembun	0,8286	0,8333	0,9333	0,8651			V
3.	Kabekelan	0,7829	0,8167	0,5333	0,7110		V	
4.	Tunggalroso	0,7886	0,8333	0,6667	0,7629		V	
5.	Kedungwaru	0,7829	0,7333	0,8667	0,7943		V	
6.	Bagung	0,8686	0,8333	0,6667	0,7895		V	
7.	Sidogede	0,8457	0,8167	0,9333	0,8652			V

8.	Sembirkadipaten	0,8343	0,7500	0,6000	0,7281		V	
9.	Kedungbulus	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262		V	
10.	Mulyosri	0,8000	0,7333	0,6667	0,7333		V	
11.	Pesuningan	0,7429	0,7500	0,8000	0,7643		V	
12.	Pecarikan	0,8286	0,7667	0,6667	0,7540		V	
13.	Kabuaran	0,8629	0,8667	0,8000	0,8432			V

(Sumber : Satu Data Indonesia – Kementerian PPN/ Bappenas 2024)

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Prembun tahun 2024, dari 13 (tiga belas) desa yang dinilai, tidak terdapat desa berstatus berkembang, tertinggal maupun sangat tertinggal. Sebanyak tiga desa, yaitu Prembun, Sidogede, dan Kabuaran, telah mencapai status Mandiri, sedangkan sepuluh desa lainnya yaitu Tersobo, Kabekelan, Tunggalroso, Kedungwaru, Bagung, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Mulyosri, Pesuningan, dan Pecarikan masih berstatus Maju. Nilai tertinggi diperoleh Desa Sidogede dengan skor 0,8652, sedangkan nilai terendah dicatat oleh Desa Kabekelan dengan skor 0,7110. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan di Kecamatan Prembun telah mengalami kemajuan yang baik dengan dominasi desa berstatus Maju, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek layanan dasar, lingkungan, dan aksesibilitas di beberapa desa agar seluruh wilayah dapat mencapai kategori Mandiri**.**

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Prembun, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Prembun

Kecamatan Prembun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Prembun dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

A. Tugas Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10) fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Prembun berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

   Camat sebagai pimpinan di tingkat kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
e) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
f) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
h) pelaksanaan penatausahaan administrasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
i) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

l) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau

kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b) penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumbersumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

l) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
n) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
o) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d) penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e) penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g) peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h) penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i) penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k) penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan

terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
e) peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h) penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;

j) penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

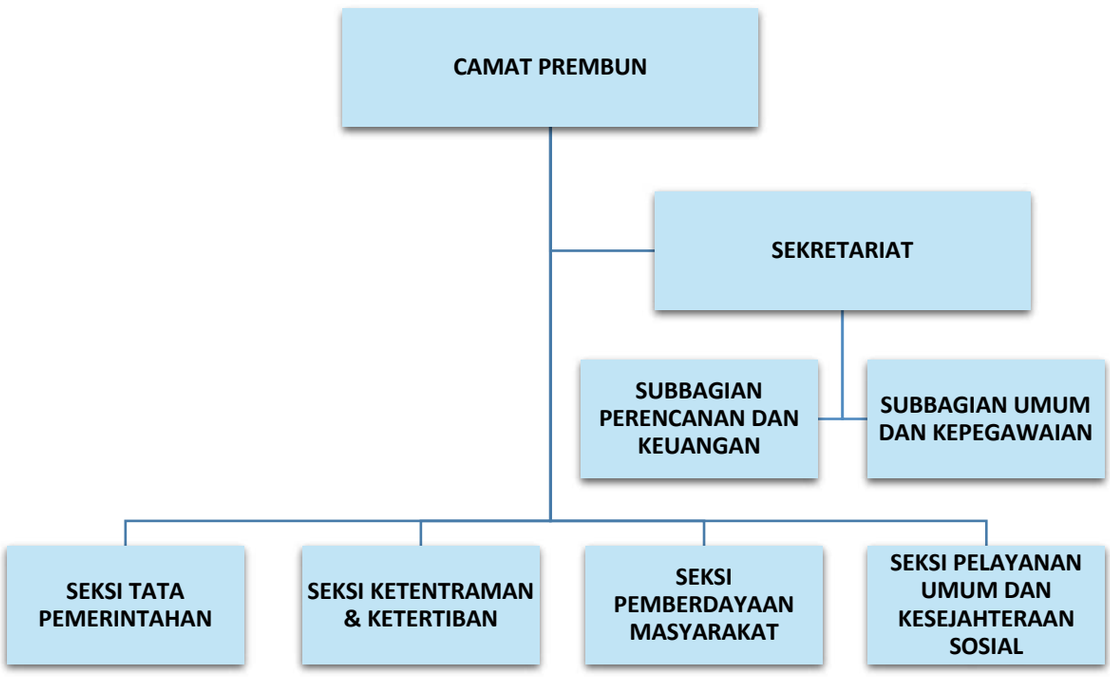
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b) pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

e) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g) koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k) penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.2 Bagan Organisasi Kecamatan Prembun
(Sumber: Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016)

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 23 orang, namun sampai dengan akhir Oktober 2025 baru sebanyak 16 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Pegawai Kecamatan Prembun

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki laki	8	11	10	8	8
Perempuan	7	6	6	8	8
Jumlah ASN	**15**	**17**	**16**	**16**	**16**

(Sumber: Kecamatan Prembun, 2025)

Tabel 2.6
Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan		1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2	1	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	5	6
5	Seksi Tata Pemerintahan			0
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2		2
Jumlah		**8**	**8**	**16**
Presentase		**50%**	**50%**	**100%**

(Sumber: Kecamatan Prembun, 2025)

Tabel 2.7
Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III-a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III-b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV-b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV-b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	0
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV-a	1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV-a	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV-a	1
9	Verifikator Keuangan	-	1
10	Perencana Ahli Pertama	-	1
11	Arsiparis Terampil	-	1
12	Pengadministrasi Perkantoran	-	1
13	Pengadministrasi Umum	-	4
14	Pengelola Umum Operasional	-	1
16	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	1
Jumlah			**16**

(Sumber: Kecamatan Prembun, 2025)

Jumlah pegawai Kecamatan Prembun tercatat sebanyak 16 orang, terdiri dari 8 laki-laki dan 8 perempuan, yang menempati jabatan mulai dari Camat, Sekretaris Kecamatan Kasubbag, Kasi, hingga staf. Secara umum, struktur kelembagaan sudah terisi di posisi strategis seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasi Ketrentaman dan Ketertiban, Kasi Pelayanan Umum dan Kesjahteraan Sosial, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Namun, terdapat satu jabatan yang kosong, yaitu Kasi Tata Pemerintahan, yang memiliki peran penting dalam penataan pemerintahan wilayah kacamatan. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang bagi pegawai yang ada, serta dapat menghambat optimalisasi fungsi kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pengisian jabatan yang kosong melalui mekanisme penempatan atau

mutasi pegawai, sekaligus evaluasi distribusi SDM agar pelayanan publik di Kecamatan Prembun dapat berjalan efektif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Kecamatan Prembun hanya ada 2 (dua) THL yang mana keduanya terfokus di bagian Pelayanan Umum.

a) Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1						1
2	Sekretaris Kecamatan	1						1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	1				3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		2	1	2		1	6
5	Seksi Tata Pemerintahan							0
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban		1					1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		2					2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1		1			2
Jumlah		**2**	**8**	**2**	**3**	**0**	**1**	**16**
Presentase		**12,5%**	**50%**	**12,5%**	**19%**	**0%**	**6%**	**100%**

(Sumber: Kecamatan Prembun, 2025)

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, di Kecamatan Prembun terdapat 16 pegawai. Dari jumlah 16 pegawai tersebut 50% berpendidikan sarjana, 12,5% berpendidikan S2, 19% berpendidikan SMA/sederajat, dan sisanya terdapat di Pendidikan D3 dan SD.

Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Prembun belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada, karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Prembun dalam kelancaran pelaksanaan tugas masih ada ketimpangan pendidikan sehingga kurang mendukung untuk akselerasi Pelayanan Publik. Perlu adanya penambahan Pegawai dengan Pendidikan Diploma/Sarjana di tingkat Pendidikan Diploma Kejuruan khususnya akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan karena tugas Kecamatan sebagai Pembina dan Pengawas Desa.

b) Pegawai berdasarkan Golongan

Gambaran Pegawai Kecamatan Prembun berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Kecamatan				1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		1	2		3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	2	2		6
5	Seksi Tata Pemerintahan					0
6	Seksi Ketrentaman dan Ketertiban			1		1
7	Seksi Pengabdian Masyarakat	1		1		2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			2		2
Jumlah		**3**	**3**	**8**	**2**	**16**
Presentase		**20%**	**20%**	**53%**	**7%**	**100%**

(Sumber: Kecamatan Prembun, 2025)

Jumlah ASN Kecamatan Prembun Tahun 2025 tercatat 16 orang, dengan komposisi Golongan VII-IX (PPPK) sebanyak 3 orang, Golongan I-II sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 8 orang, dan Golongan IV sebanyak 2 orang. Jabatan struktural seperti Camat,

Sekretaris Kecamatan, Kasubbag, dan Kasi sudah terisi dan sebagian besar berada di Golongan III, sedangkan Camat dan Sekretaris Kecamatan sudah berada pada Golongan IV.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Prembun. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Prembun berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Aset Tanah Kecamatan Prembun

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Lapangan Olahraga	7.614	19/09/1986	Jln. Jeruk Nomor 05 Prembun	-	19/09/1986	-	Alun-alun Prembun	Pengadaan APBD	205.578.000	-
2	Tanah Kampung	1.411	15/04/1985	Jln. Jeruk Nomor 05 Prembun	-	15/04/1985	-	Tanah untuk Kantor dan Rumah Dinas Camat Kecamatan Prembun	Hibah	38.097.000	-
3	Tanah Kampung	6.952	15/04/1985	Jln. Jeruk Nomor 05 Prembun	-	15/04/1985	-	Kantor Kecamatan Prembun	Hibah	187.704.000	-

Tabel 2.11
Gedung dan Bangunan Kecamatan Prembun

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	40	Jl. Jeruk Nomor 5 Prembun	40	Milik Pemda	Hibah	20.200.000	-
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	161	Jl. Jeruk Nomor 5 Prembun	161	Milik Pemda	Hibah	81.305.000	-
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	240	Jl. Jeruk Nomor 5 Prembun	240	Milik Pemda	Hibah	136.591.000	-
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	100	Jl. Jeruk Nomor 5 Prembun	100	Milik Pemda	Hibah	10.000.000	-
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	40	Jl. Jeruk Nomor 5 Prembun	40	Milik Pemda	Hibah	20.200.000	-

6	Pendopo	Kb	472.13	Jl. Jeruk Nomor 5 Prembun	472.13	Milik Pemda	Pengadaan APBD	366.140.000	-
7	Bangunan Gedung Instalasi Lain-lain	B	15	Jl. Jeruk Nomor 5 Prembun	15	Milik Pemda	Hibah	7.575.000	-

Tabel 2.12
Sarana dan Prasarana Kecamatan Prembun

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Mobil	1	1	0	0	0	1	1
2	Sepeda Motor	13	2	1	10	0	13	13
3	Sepeda Motor Kades	13	0	0	13	0	13	13
4	Komputer	1	0	0	1	0	1	1
5	Laptop	7	2	2	3	1	7	10
6	Printer	5	1	1	3	0	5	5
7	AC	5	3	0	2	1	5	6
8	Sofa Tamu	1	1	0	0	0	1	1
9	Kursi Rapat	67	67	0	0	0	67	67
10	Mesin Ketik	2	0	1	1	0	2	2
11	Lemari Kayu	4	3	0	1	0	4	4
12	Rak Besi	5	3	0	2	0	5	5
13	Filling Kabinet	9	6	0	3	0	9	9
14	LCD Proyektor	2	1	0	1	0	2	2
15	Lemari Kaca	2	2	0	0	0	2	2
16	Lemari Besi	9	6	1	2	0	9	9
17	CCTV	8	8	0	0	0	8	8
18	Microphone	5	2	0	3	0	5	5
19	Tripod Mic Stand	2	2	0	0	0	2	2
20	Meubel Tamu	1	1	0	0	0	1	1
21	Bangku Tunggu	4	4	0	0	0	4	4

22	Kipas Angin	5	2	1	2	0	5	5
23	Televisi	1	1	0	0	0	1	1
24	Sound System	3	2	0	1	0	3	3
25	Tustel	1	0	1	0	0	0	1
26	Kamera	1	1	0	0	0	1	1
27	Dispenser	3	2	0	1	0	3	3
28	Mimbar Podium	1	1	0	0	0	1	1
29	Genrator Set / Genset	2	1	1	0	0	1	1
30	Papan Pengumaman	1	0	0	1	0	1	1
31	Gorden	18	10	0	8	0	18	18
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	0	2	2
33	Kursi Kerja Eselon III	2	2	0	0	0	2	2
34	Kursi Kerja Staff	2	2	0	0	0	2	2
35	Meja Rapat	14	14	0	0	0	14	14
36	Meja Kayu	52	30	2	20	0	50	50
37	Kursi Kayu	24	16	0	8	0	24	25
38	Kursi Plastik	32	32	0	0	0	32	32
39	Whiteboard	1	1	0	0	0	1	1
40	Mesin Pemotong Rumput	1	0	0	1	0	1	1
41	Mimbar	1	1	0	0	0	1	1

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Prembun secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Ruang Arsip, Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Prembun. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Prembun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4) Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impacts)*. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Prembun dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Prembun selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
   b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
      Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Prembun setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun masih kurang,
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Prembun setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak

mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Prembun setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada Masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

   Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Prembun setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

   Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Prembun dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

   Kinerja pelayanan Kecamatan Prembun di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, desa, dan kelurahan;
d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
   b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
   c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Prembun;
   d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
   e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
   f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Prembun;
   g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah

mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Prembun secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indeks Kepuasan Masyarakat																							
a.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	-	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38	-	102%	106%	107%	106%	106%	-	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan																							
a.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	-	-	-	Indeks	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	86,91	88,54	92,70	96,15	95,19	-	105%	102%	104%	106%	104%	-	

Tabel 2.14
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**89,71**	**96,99**	**97,85**	**92,46**	**68,20**	**-**	**89,71**	**96,99**	**97,85**	**92,46**	**68,20**
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**99,99**	**100**	**99,80**	**98,80**	**98,61**	**-**	**99,99**	**100**	**99,80**	**98,80**	**98,61**
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan Prembun	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**99,05**	**99,99**	**99,68**	**100**	**98,96**	**-**	**99,05**	**99,99**	**99,68**	**100**	**98,96**
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**99,99**	**98,97**	**99,40**	**99,82**	**72,15**	**-**	**99,99**	**98,97**	**99,40**	**99,82**	**72,15**

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Prembun pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Prembun, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui *trend* tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi *trend* yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Prembun berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Prembun, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Prembun tahun 2024.

Berdasarkan tabel 2.14 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Prembun relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Prembun pada periode perencanaan Renstra meliputi aparatur pemerintahan, pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat, serta masyarakat secara umum.

1. Aparat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

   Aparatur kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi sasaran utama dalam rangka peningkatan kapasitas, disiplin, dan profesionalisme kerja. Hal ini diwujudkan melalui pembinaan dan pengawasan rutin, peningkatan kedisiplinan aparatur, serta pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

   Pemerintah desa dan kelembagaan desa merupakan sasaran strategis dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kecamatan berperan aktif dalam memberikan bimbingan administrasi, koordinasi, sinkronisasi program, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan rutin desa. Selain itu, perangkat kelembagaan seperti PKK, Posyandu, dan Linmas juga menjadi perhatian dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, partisipatif, dan berdaya guna.

3. Masyarakat Kecamatan Prembun

   Masyarakat Kecamatan Prembun merupakan penerima manfaat langsung dari berbagai layanan publik. Melalui penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), masyarakat dapat mengakses layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, masyarakat juga menjadi sasaran dari berbagai program pembangunan dan sosial, seperti Musrenbang Desa/Kecamatan, bantuan sosial tunai, program penanggulangan kemiskinan, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), serta kegiatan pemberdayaan melalui kelembagaan kemasyarakatan.

4. Lembaga dan Instansi Terkait

   Lembaga dan instansi terkait juga menjadi bagian dari kelompok sasaran, khususnya dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan

Prembun. Melalui peran ini, Kecamatan Prembun diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah kabupaten dengan desa/kelurahan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Prembun secara komprehensif mencakup aparatur, pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga terkait, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan riil serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.5. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Prembun. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Prembun. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Prembun:

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Prembun Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			*2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.057.624.000**	**1.846.049.091**	**89,71**	**2.156.908.000**	**2.092.147.460**	**96,99**	**2.333.426.000**	**2.283.298.000**	**97,85**	**2.225.829.000**	**2.057.919.578**	**92,46**	**2.306.417.000**	**1.572.883.523**	**68,20**		**81,22**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100	7.000.000	6.997.000	99,95	5.600.000	5.553.600	98,17	7.000.000	6.995.000	99,93	5.400.000	4.776.350	88,45		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.794.437.000	1.596.391.290	88,96	1.940.278.000	1.896.937.498	97,76	2.124.384.000	2.083.441.978	98,07	2.009.245.000	1.843.882.655	91,77	2.142.365.000	1.436.138.514	67,04		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100,00	2.400.000	2.309.000	96,21	2.400.000	2.399.500	99,98	-	-	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.060.000	40.059.000	99,99	50.106.000	50.044.000	99,87	44.040.000	43.967.500	99,84	63.652.000	63.568.900	99,87	47.942.000	42.537.820	88,73		
	Pengadaan barang milik Daerah Penunjung urusan pemerintah daerah	36.227.000	36.082.000	99,59	27.000.000	25.645.000	94,98	38.846.000	35.495.000	91,37	21.000.000	20.677.000	98,46	33.200.000	23.026.257	69,36		
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.400.000	40.079.401	75,05	62.024.000	42.509.194	68,53	55.085.000	49.940.345	90,66	69.066.000	68.459.832	99,12	38.010.000	32.026.082	84,26		
	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	127.500.000	127.437.400	99,95	67.500.000	67.014.768	99,28	63.071.000	62.590.580	99,24	53.466.000	51.936.691	97,14	39.500.000	34.377.500	87,03		

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**51.000.000**	**50.999.000**	**99,99**	**62.000.000**	**62.000.000**	**100**	**58.985.000**	**58.866.398**	**99,80**	**1.168.938.000**	**1.152.675.400**	**98,61**	**11.350.000**	**11.189.500**	**98,59**		**99,09**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.000.000	50.999.000	99,99	62.000.000	62.000.000	100	58.985.000	58.866.398	99,80	1.168.938.000	1.152.675.400	98,61	11.350.000	11.189.500	98,59		
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.797.000**	**5.397.000**	**99,05**	**21.000.000**	**20.999.900**	**99,99**	**16.807.000**	**16.754.000**	**99,68**	**12.682.000**	**12.682.000**	**100,00**	**9.340.000**	**9.242.592**	**98,96**		**99,32**
	Penyelenggara urusan Pemerintah Umum	5.797.000	5.397.000	99,05	21.000.000	20.999.900	99,99	16.807.000	16.754.000	99,68	12.682.000	12.682.000	100,00	9.340.000	9.242.592	98,96		
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**79.000.000**	**78.257.050**	**99,99**	**103.000.000**	**101.943.000**	**98,97**	**142.825.000**	**142.017.450**	**99,40**	**100.898.000**	**100.714.947**	**99,82**	**87.968.000**	**63.466.588**	**72,15**		**85,84**
	Fasilitasi Rekomendasi dankoordinasi Pembinaandan pengawasan Pemerintah Desa	79.000.000	78.257.000	99,99	103.000.000	101.943.000	98,97	142.825.000	142.017.450	99,40	100.714.947	100.714.947	99,82	87.968.000	63.466.588	72,15		
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**33.716.000**	**33.714.000**	**93,10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**93,10**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban	33.716.000	33.714.000	93,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* tahun berjalan

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan kinerja pelayanan Kecamatan Prembun tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara umum tergolong baik dengan rata-rata realisasi di atas 93%. Puncak pencapaian terjadi pada tahun 2024, di mana sebagian besar program berhasil mendekati target maksimal dengan capaian hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif serta didukung dengan pengelolaan anggaran yang relatif optimal. Namun demikian, pada tahun 2025 terlihat adanya penurunan capaian di hampir seluruh program, salah satunya Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang menurun dari 92,46% menjadi 68,20%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kekosongan jabatan pada beberapa posisi struktural, yang berimplikasi pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran, selain itu dikarenakan karena tahun anggaran 2025 masih berjalan (data hingga Oktober 2025).

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa meskipun sistem perencanaan telah tersusun dengan baik, capaian kinerja masih rentan terhadap faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi antisipatif dalam penyusunan program dan kegiatan, baik melalui penyesuaian prioritas maupun inovasi pelaksanaan, sehingga target pelayanan publik tetap dapat tercapai secara konsisten meskipun terjadi dinamika kebijakan anggaran. Dengan langkah tersebut, kinerja pelayanan Kecamatan Prembun diharapkan dapat lebih adaptif, efisien, serta berorientasi pada keberlangsungan layanan masyarakat.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Prembun sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Prembun terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara struktural dan jumlah SDM yang ada di kecamatan, komposisi pejabat struktural lebih sedikit dibandingkan jumlah staf yang ada di kecamatan. Dari sisi pendidikan rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan SLTA dan Strata-1. Permasalahan lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai

dalam menunjang fungsi organisasi maka Permasalahan di Kecamatan Prembun yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2025-2029 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Tabel 2.16
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Prembun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekruitmen pegawai
		Kurangnya peran serta masyarakat	Kesadaran peran serta masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidkan masyarakat sebagian besar SMP/sederajat
		Minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana Pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representatif
				Belum adanya tempat arsip untuk arsip kependudukan
				Ruang laktasi kurang memadai

C. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiscal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044

menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Prembun masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal berupa Kawasan Perkotaan Prembun. Sedangkan pada Sistem Jaringan Prasarana, Kecamatan Prembun memiliki stasiun operasi kereta api yaitu Stasiun Prembun.

Renstra Kecamatan Prembun diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Prembun termasuk dalam Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa berbasis Agrobisnis. Kecamatan Prembun memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah pengembangan pertanian, permukiman, serta perdagangan dan jasa.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tamping lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Prembun, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal di kawasan padat penduduk dan area pasar

3. Pengerukan tanah dari pegunungan di sebagian wilayah kecamatan untuk pembangunan pemukiman ataupun perkerjaan timbunan tanah atau pengurukan.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Prembun meliputi:

1. Penerapan vegetasi penahan longsor di lereng curam
2. Pemasangan bronjong penahan longsor di tepi sungai
3. Penguatan kelembagaan bank sampah dan program 3R (*reduce, reuse, recycle*)
4. Pemantauan dan reboisasi lahan setelah pengerukan.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Kabupaten Kebumen 2025-2029 yaitu Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beriman

Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang

mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.

2. **Maju**

   Terbangunnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui: penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tecno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

3. **Sejahtera**

   Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

4. **Berbudaya**

   Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan Kebumen sebagai bumi tua tentu

banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jatidiri masyarakat Kebumen.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. **MISI 1: Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif**
   Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
2. **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan**
   Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3. **MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan**
   Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun

infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4. **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi***

   Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal**

   Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Prembun mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui pelayanan PATEN. Berikut adalah peranan Kecamatan Prembun yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. **ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif**

   Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan /atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

2. **Desa Berdaya**

   Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. **Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun**

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskampling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Prembun, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Prembun.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi langkah penting untuk menyusun arah kebijakan yang tepat sasaran. Kecamatan Prembun sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. Kecamatan Prembun masih menghadapi tantangan berupa tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang berdampak pada keselamatan masyarakat, kerusakan lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas sosial-ekonomi. Di sisi lain, kualitas layanan publik kecamatan belum optimal akibat keterbatasan kapasitas aparatur, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, pengembangan potensi ekonomi lokal seperti olahan bengkoang juga belum berjalan maksimal karena lemahnya inovasi, pemasaran, dan dukungan penguatan usaha masyarakat.

Jika dilihat dalam kerangka nasional, persoalan tersebut selaras dengan fokus RPJMN 2025-2029 yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim (Bappenas, 2024). Dari sisi daerah, RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 menegaskan isu strategis terkait kerentanan wilayah terhadap bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sebagai prioritas utama. Selaras dengan itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD juga menyoroti pentingnya pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan pelestarian ekosistem sungai untuk mendukung keberlanjutan pembangunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024).

Di sisi lain, Kecamatan Prembun memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi kerentanan bencana, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pengembangan ekonomi lokal. Potensi sumber daya alam seperti komoditas bengkoang dapat dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah melalui penguatan inovasi, pemasaran, dan kemitraan UMKM, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, potensi sosial berupa tingginya partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa dapat diarahkan untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis komunitas serta mendukung

pelayanan publik yang lebih responsif. Dukungan teknologi informasi dan SDM aparatur yang terus ditingkatkan juga menjadi modal penting untuk mempercepat digitalisasi layanan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi penanganan bencana di tingkat wilayah. Dengan demikian, analisis isu strategis di Kecamatan Prembun perlu diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, pengelolaan resiko bencana, pengelolaan lingkungan sungai dan drainase, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, sebagaimana juga diamanatkan dalam kerangka kebijakan nasional maupun daerah. Berikut ini tabel mengenai teknik menyimpulkan isu strategis di Kecamatan Prembun:

Tabel 2.17
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan • Lahan pertanian produktif (sawah dan hortikultura) • Sumber daya manusia lokal (petani, pelaku UMKM) • Sungai dan jaringan irigasi	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan • Rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan • Kerentanan lingkungan akibat banjir dan perubahan tata guna lahan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja) • Pemberdayaan UMKM, penurunan kemiskinan • Program pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat • Normalisasi dan perawatan Sungai/ irigasi antarwilayah	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Penguatan ketahanan pangan melalui perbaikan infrastruktur irigasi dan pengelolaan resiko bencana • Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah • Pengelolahan sungai dan drainase berkelanjutan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik *(good governnance)* menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan, sehingga tujuan Renstra Perangkat Daerah Adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Prembun.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun Visi dari Kabupaten Kebumen sesuai RPJMD yaitu **KEBUMEN BERDAYA** : "*Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya*" yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan yaitu Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.

Sasaran jangka menengah Kecamatan Prembun adalah Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Prembun guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	91,40	92,42	92,50	92,55	92,60	92,65
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Prembun	Indeks Tata Kelola Kecamatan Prembun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Srategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Prembun dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

(Sumber : Kecamatan Prembun 2025)

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Prembun selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

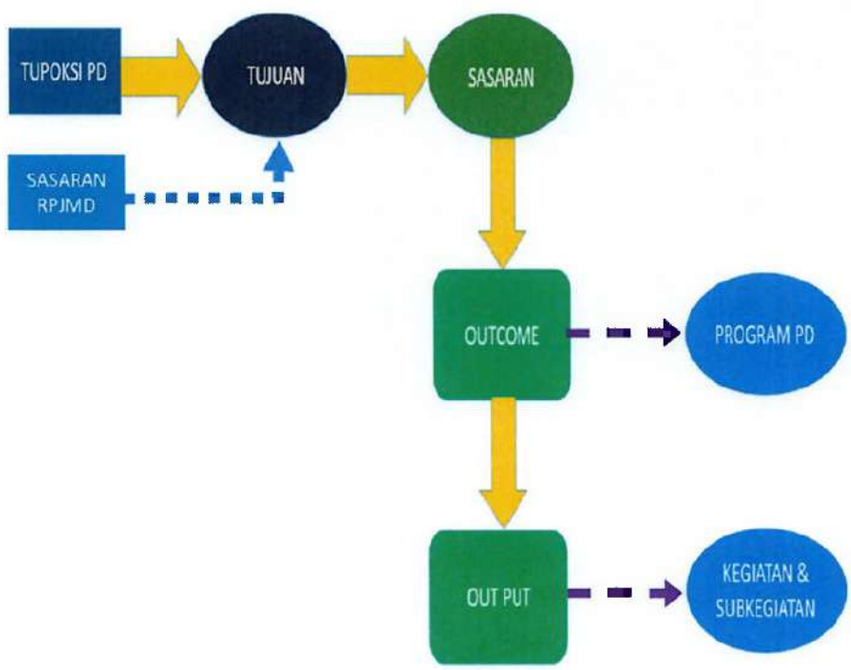
(Sumber : Kecamatan Prembun 2025)

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Prembun guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Prembun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Prembun. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Prembun dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Prembun

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
D	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif 7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN PREMBUN				**2.548.927.384**		**2.623.062.423**		**2.721.057.896**		**2.834.269.413**		**2.914.375.800**	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Nilai)	70,30	70,35	2.440.927.384	71,27	2.516.062.423	72,51	2.618.057.896	73,76	2.730.269.413	75,00	2.809.375.800	KECAMATAN PREMBUN
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	KECAMATAN PREMBUN
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Indeks)	100	100	14.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	KECAMATAN PREMBUN
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	87.000.000	100	84.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	KECAMATAN PREMBUN

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Prembun						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Prembun					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Prembun)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Sarana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (%)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	

				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Indeks)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	

				Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (%)	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.548.927.384		2.623.062.423		2.721.057.896		2.834.269.413		2.914.375.800	
7.01	KECAMATAN					2.548.927.384		2.623.062.423		2.721.057.896		2.834.269.413		2.914.375.800	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.440.927.384		2.516.062.423		2.618.057.896		2.730.269.413		2.809.375.800	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Nilai)	70,30	70,33	70,35		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	100	11	14		14		14		17		14		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.170.344.364		2.238.073.362		2.334.551.370		2.438.652.756		2.514.558.077	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	100	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.160.344.364		2.228.073.362		2.324.551.370		2.428.652.756		2.504.558.077	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	20	20	20		20		20		20		20		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	8		8		8		8		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**56.875.020**		**53.281.061**		**55.798.526**		**55.908.657**		**56.109.723**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**100**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					**7.500.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					**10.875.020**		**9.221.061**		**9.738.526**		**9.348.657**		**9.549.723**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**					**1.500.000**		**1.560.000**		**1.560.000**		**1.560.000**		**1.560.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**					**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					**7.000.000**		**5.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					**5.000.000**		**5.500.000**		**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**59.000.000**		**62.000.000**		**65.000.000**		**73.000.000**		**71.000.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan sarana (Dengan Satuan:Unit)**	**100**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**37.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**48.000.000**		**46.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**12.000.000**		**12.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**101.908.000**		**103.908.000**		**103.908.000**		**103.908.000**		**103.908.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**100**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					**35.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					**66.408.000**		**66.408.000**		**66.408.000**		**66.408.000**		**66.408.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**46.800.000**		**51.800.000**		**51.800.000**		**51.800.000**		**56.800.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**100**	**36**	**36**		**36**		**36**		**36**		**36**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**					**29.800.000**		**29.800.000**		**29.800.000**		**29.800.000**		**34.800.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	24	24	24		24		24		24		24		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**					**10.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**7.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**		**11.000.000**	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**7.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**		**11.000.000**	

KEBUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS**
7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**					**7.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**		**11.000.000**	**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	13	3	0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**14.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Indeks)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**14.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Prembun (Dengan Satuan:Kegiatan)**	**100**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
7.01.05.2.01.0001	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**					**14.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**87.000.000**		**84.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	**Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**87.000.000**		**84.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
7.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**					**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	5		5		5		5		5		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**					**0**		**6.000.000**		**0**		**0**		**0**	**KASI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		10		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	**Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**					**7.000.000**		**4.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	**KASI TATA PEMERINTAHAN**
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	13		13		13		13		13		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	**Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**					**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**	**KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**					**19.000.000**		**19.000.000**		**19.000.000**		**19.000.000**		**19.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**25.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					**11.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	13	13	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				TOTAL:		**2.548.927.384**		**2.623.062.423**		**2.721.057.896**		**2.834.269.413**		**2.914.375.800**	

KABUPATEN KEBUMEN

4.3. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Mendukung Program Unggulan Bupati **Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Mendukung Program Unggulan Bupati**: Program ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif**, **Program Desa Berdaya,** dan **Program Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Mendukung Program Unggulan Bupati: **Program Desa Berdaya**
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Mendukung Program Unggulan Bupati: **Program Desa Berdaya**
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daearah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Prembun. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Prembun
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	Indeks	91,40	92,42	92,50	92,55	92,60	92,65	
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Prembun	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(Sumber: Renstra SIPD-RI)

4.5. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Kinerja pembangunan daerah mencerminkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan secara objektif dan terukur tingkat pencapaian pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Namun demikian, berdasarkan data pada Tabel 4.6, belum terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan Kecamatan Prembun untuk periode perencanaan tahun 2025–2029.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V
PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi Renstra 2025-2029 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan Prembun diantaranya Permasalahan di wilayah ini menunjukkan adanya tantangan ganda pada sektor lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik, yang saling terkait. Kawasan rawan bencana seperti banjir dan gagal panen, dikombinasikan dengan saluran irigasi yang tidak lancar dan kondisi sungai/drainase yang dipenuhi eceng gondok dan sampah, mengancam produktivitas pertanian. Kondisi jalan yang rusak semakin menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas layanan publik yang belum optimal dan pemanfaatan digitalisasi yang terbatas menambah tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas pemerintahan di wilayah tersebut. Isu strategis di kecamatan Prembun diantaranya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan perhitungan Indek Kepuasan Masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM.

Kecamatan Prembun memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati , jika di kaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan misi ke 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Prembun selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Prembun. Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu *"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya"*.

Demikian pedoman dan kaidah ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan transisi dan implementasi program/kegiatan di Kecamatan

Prembun. Diharapkan seluruh pihak terkait dapat memanfaatkan pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga setiap langkah pelaksanaan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan komitmen bersama, pedoman ini akan menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan Prembun.

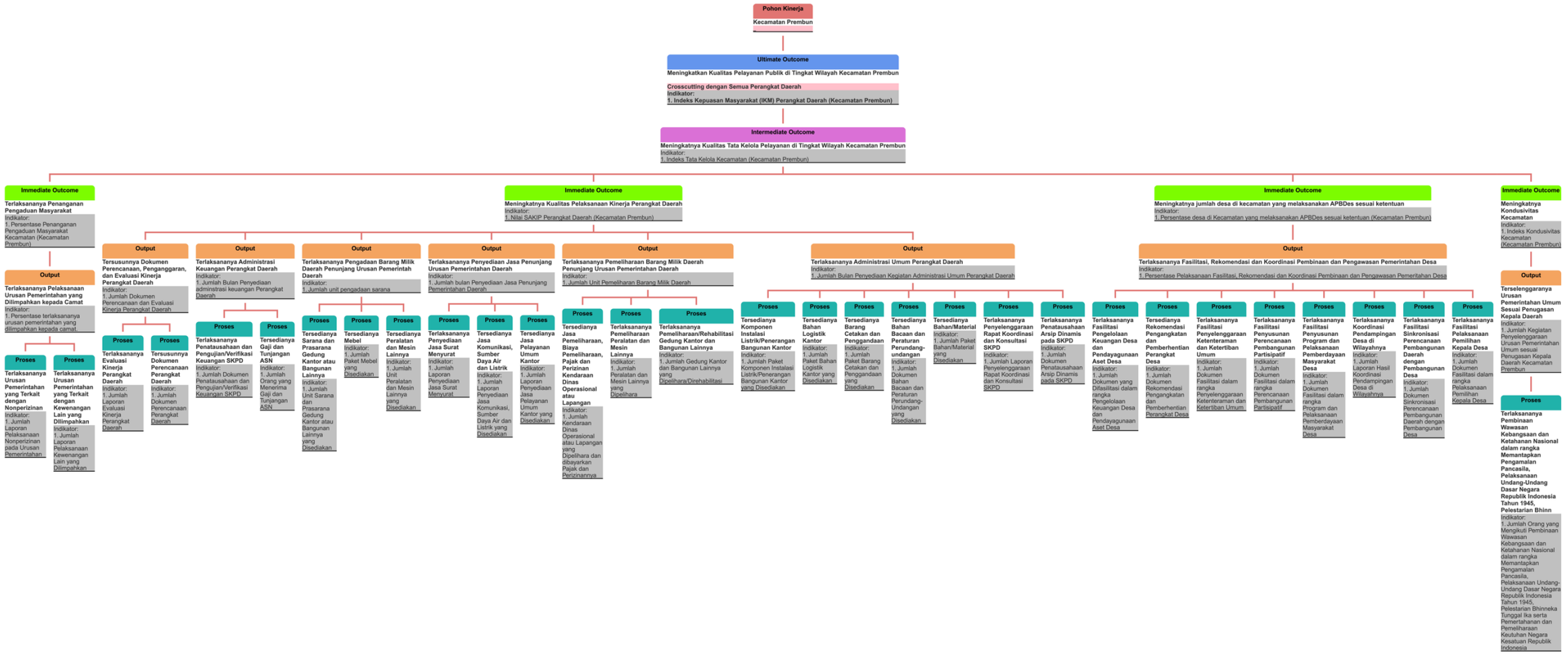
Kebumen, 19 September 2025
CAMAT PREMBUN

MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198206232000121002

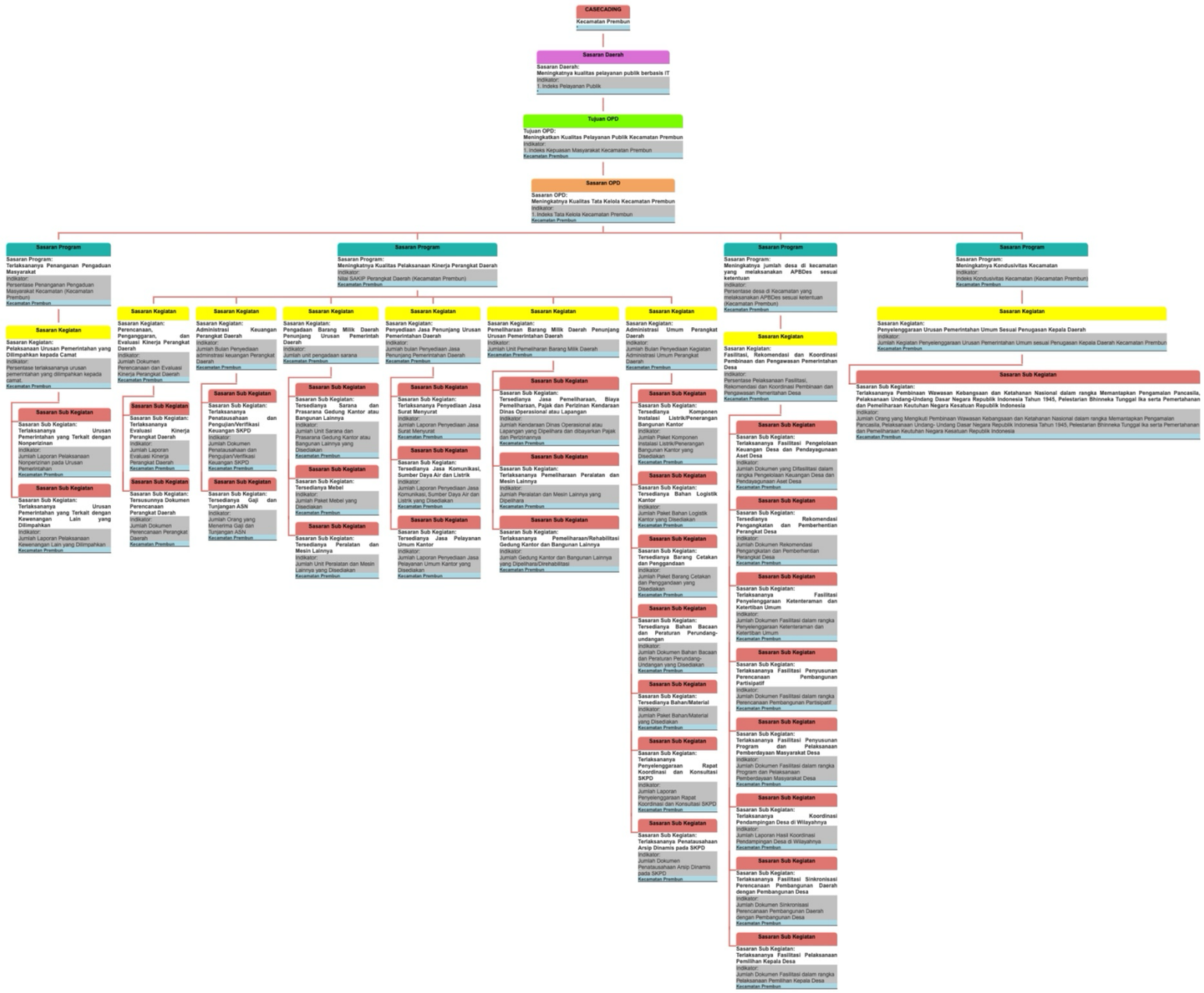
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Gampo Riyadi	
Ir Latifah	

LAMPIRAN

POHON KINERJA KECAMATAN PREMBUN



CASECADING KECAMATAN PREMBUN



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Prembun
Kabupaten Kebumen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.548.927.384		2.623.062.423		2.721.057.896		2.834.269.413		2.914.375.800	
7.01	KECAMATAN					2.548.927.384		2.623.062.423		2.721.057.896		2.834.269.413		2.914.375.800	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.440.927.384		2.516.062.423		2.618.057.896		2.730.269.413		2.809.375.800	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Nilai)	70,30	70,33	70,35		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	100	11	14		14		14		17		14		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.170.344.364		2.238.073.362		2.334.551.370		2.438.652.756		2.514.558.077	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	100	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.160.344.364		2.228.073.362		2.324.551.370		2.428.652.756		2.504.558.077	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	20	20	20		20		20		20		20		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	8		8		8		8		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**56.875.020**		**53.281.061**		**55.798.526**		**55.908.657**		**56.109.723**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**100**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					**7.500.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					**10.875.020**		**9.221.061**		**9.738.526**		**9.348.657**		**9.549.723**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**					**1.500.000**		**1.560.000**		**1.560.000**		**1.560.000**		**1.560.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**					**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					**7.000.000**		**5.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					**5.000.000**		**5.500.000**		**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**59.000.000**		**62.000.000**		**65.000.000**		**73.000.000**		**71.000.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan sarana (Dengan Satuan:Unit)**	**100**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**37.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**48.000.000**		**46.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**12.000.000**		**12.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**101.908.000**		**103.908.000**		**103.908.000**		**103.908.000**		**103.908.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**100**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					**35.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					**66.408.000**		**66.408.000**		**66.408.000**		**66.408.000**		**66.408.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**46.800.000**		**51.800.000**		**51.800.000**		**51.800.000**		**56.800.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**100**	**36**	**36**		**36**		**36**		**36**		**36**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**					**29.800.000**		**29.800.000**		**29.800.000**		**29.800.000**		**34.800.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	24	24	24		24		24		24		24		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**					**10.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**7.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**		**11.000.000**	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**7.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**		**11.000.000**	

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS**
7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**					**7.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**		**11.000.000**	**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	13	3	0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**14.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Indeks)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**14.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Prembun (Dengan Satuan:Kegiatan)**	**100**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
7.01.05.2.01.0001	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**					**14.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**87.000.000**		**84.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	**Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**87.000.000**		**84.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**		**79.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
7.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**					**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	**KASI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	5		5		5		5		5		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**					**0**		**6.000.000**		**0**		**0**		**0**	**KASI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		10		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	**Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**					**7.000.000**		**4.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	**KASI TATA PEMERINTAHAN**
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	13		13		13		13		13		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	**Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**					**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**	**KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**					**19.000.000**		**19.000.000**		**19.000.000**		**19.000.000**		**19.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**25.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					**11.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	13	13	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				TOTAL:		**2.548.927.384**		**2.623.062.423**		**2.721.057.896**		**2.834.269.413**		**2.914.375.800**	

KABUPATEN KEBUMEN

RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR

NO.	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PENGUKURAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017)
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan Prembun	(Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan) / 3) * 100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes / Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan / Jumlah Desa di Kecamatan) x 100%
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Prembun)	Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
4	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Prembun)	(Jumlah aduan masyarakat yang ditangani / Jumlah aduan yang masuk) x 100%
5	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Prembun)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100%
6	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Prembun)	(Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan / Jumlah desa di Kecamatan) x 100%

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN
Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54394,Telepon (0287) 662321
Laman https://kec-prembun.kebumenkab.go.id,
Pos-el kec-prembun@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR 000.7.6.1/1286 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Prembun tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang acrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2045; dan
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab
   Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

b. Ketua
   1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra di lingkungan Kecamatan Prembun;
   2) Menetapkan jadwal kegiatan, membagi tugas kepada anggota tim, serta mengawasi pelaksanaannya;
   3) Menyampaikan perkembangan penyusunan Renstra kepada Camat Prembun secara berkala;
   4) Bertanggung jawab atas proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 di lingkungan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

c. Sekretaris
   1) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra;
   2) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
   3) Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan penyusunan Renstra;
   4) Menyiapkan dan Menyusun dokumen Renstra.

d. Anggota
   1) Mengumpulkan data dan informasi dari seksi dan subbagian masing-masing;
   2) Menyusun bahan analisis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
   3) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Renstra;
   4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penyusunan Renstra.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Prembun. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, b, c, dan d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Prembun Tahun Anggaran yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Camat Prembun Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 29 Agustus 2025

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN



MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR 000.7.6.1/1286 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si	Camat Prembun	Penanggung Jawab
2.	ENI KUSUMAHASTUTI, S.E., M.M.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	SIGIT SUMANTRI, S.A.P.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris I
4.	ALI MASKUR, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris II
5.	ANITA NUR MAYLITASARI, A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota
6.	Ir. ENDAH HENDRASTUTI	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	SUJATMIKO, S.M.	Kasi Pelayananan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	SUSIYANTO, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
9.	SITI MUSRIFAH, S. Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

MARTINUS YUDANTORO, S.STP., M.Si.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN FORUM RENSTRA





